BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak terkait yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik / masyarakat.

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun, sebagai bahan untuk menilai kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu diperlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Pimpinan OPD menyusun Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif terhadap capaian. Untuk menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk setiap kebijakan / program / kegiatan Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 yang telah mendapatkan pengesahan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang

diharapkan. Pengukuran dilakukan secara berkala, baik triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan penilaian atas capaian target dari masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

3.1. Capaian Kerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban publik atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Pada pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijaksanaan yang ditetapkan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian kinerja sasaran dengan metode membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dimasa mendatang.

Motode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas bahwa sasaran dan program Tahun 2025 telah dikonversi dari program yang dirumuskan dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Tahun 2025. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

3.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dillihat melalui Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran misi. Misi yang dimaksud adalah menjaga kualitas lingkungan hidup, yakni meliputi kualitas air, kualitas udara, Kualitas Air Laut dan tutupan lahan yang merupakan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Terjadinya perubahan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi pada Tahun 2025 dari sebelumnya sebesar 71,98 menjadi 68,19 disebabkan oleh adanya perubahan metode perhitungan IKLH secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perubahan tersebut meliputi penambahan parameter baru dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU), perubahan metode perhitungan pada Indeks Kualitas Air (IKA), serta perubahan metode pada Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana pada metode yang baru telah memperhitungkan 23 kelas tutupan lahan yang lebih rinci dibandingkan metode sebelumnya. Dengan diberlakukannya metode perhitungan yang baru tersebut, maka seluruh capaian dan target IKLH, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus dilakukan penyesuaian kembali agar menggunakan basis perhitungan yang sama dan dapat diperbandingkan secara akurat.

Perubahan metode ini secara umum menghasilkan nilai IKLH yang lebih rendah dibandingkan metode sebelumnya, karena indikator yang digunakan menjadi lebih lengkap, detail, dan menggambarkan kondisi lingkungan hidup yang lebih komprehensif. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun realisasi capaian IKLH pada tahun berjalan telah melebihi target sebelumnya sebesar 71,98, namun nilai tersebut masih menggunakan metode perhitungan lama. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian target menjadi 68,19 agar selaras dengan metode perhitungan baru yang telah disepakati dan ditetapkan secara nasional.

Penyesuaian target ini bukan menunjukkan adanya penurunan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan metodologi perhitungan agar perencanaan, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian IKLH antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tetap sinkron dan menggunakan standar yang sama. Target yang telah disesuaikan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, serta digunakan sebagai dasar dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025 realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 75,15 dari target yang ditetapkan yaitu 68,19 sehingga untuk Tahun 2025 nilai

IKLH mencapai target. Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2024 yaitu 71.93 dengan capaian IKLH di Tahun 2024 yaitu 72.69, maka terjadi peningkatan capaian.

Hasil perhitungan, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2025 yaitu 78,26 Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 72,87, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yaitu 78,24 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 68,65. Sehingga didapat nilai IKLH sebesar 75,15.

Rumus Perhitungan Nilai IKLH adalah:

= (0,428 x IKU) + (0,340 x IKA) + (0,133x IKL) + (0,099 x IKAL)

= (0,428 x 78,26) + (0,340x 72,87) + (0,133x 68,65) + (0,099 x 78,24)

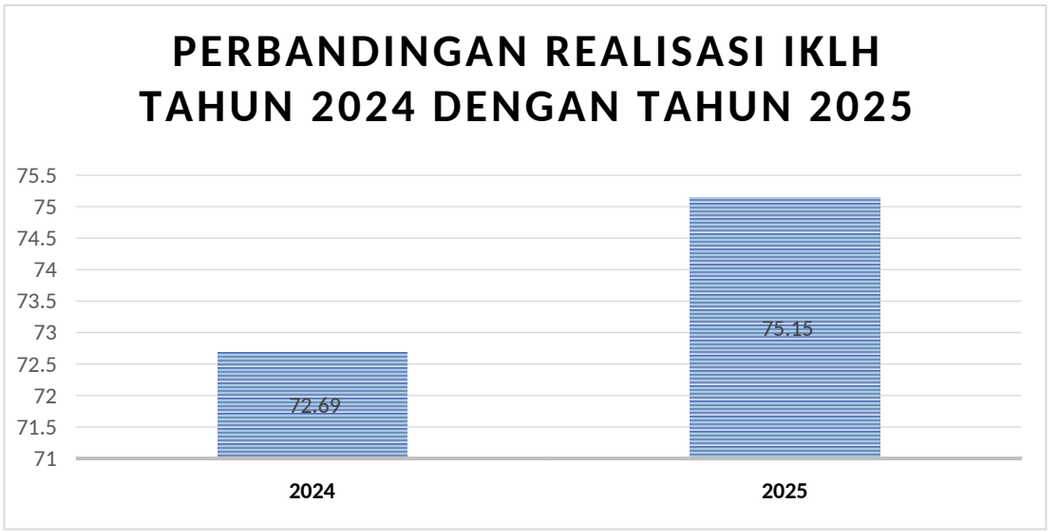
= 75,15

3.2.2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2024 yaitu 72.69, capaian IKLH di Tahun 2025 yaitu 75.15, terjadi peningkatan capaian. Esensi dari nilai IKLH di atas adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka 78.26. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 90.25 maka terjadi penurunan sebesar 11.97.
b. Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka 72.87 Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2025 bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 59.54 maka terjadi peningkatan sebesar 13.33.
c. Indeks Kualitas Lahan secara perhitungan berdasarkan website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menunjukkan angka 68.65**.** bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 44.52 maka terjadi peningkatan sebesar 24,13.
d. Indeks Kualitas Air Laut berdasarkan perhitungan memiliki angka 78,24, apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Air Laut pada Tahun 2024 adalah sebesar 79,71 maka terjadi penurunan sebesar 1.47.

Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2024 Dengan IKLH Tahun 2025



Tabel 3.1. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,93	72,69	101,05	68,19	75,15	110,20

Keterangan = T : Target,
R : Realisasi
C : Capaian
* : Realisasi tahun 2024

3.2.3. Persentase Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam renstra

Tabel 3.2. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target 2025	Tingkat Kemajuan (persen)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	75,15	68,19	110,20

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi mencapai 75,15, melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebesar 68,19. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 110,20%, yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup berada pada kategori sangat baik. Capaian ini secara khusus merupakan hasil pengukuran kinerja yang mengacu pada target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Capaian yang melebihi target Renstra ini juga menunjukkan bahwa perencanaan kinerja yang telah disusun mampu diimplementasikan secara optimal bahkan melampaui ekspektasi yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tersebut antara lain meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah, serta pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan yang konsisten. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan turut berkontribusi terhadap capaian IKLH.

Meskipun capaian telah melampaui target Renstra, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti tekanan terhadap sumber daya alam, peningkatan aktivitas industri, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan pengawasan, serta inovasi program lingkungan agar capaian

kinerja tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya.

3.2.4. Realisasi kinerja provinsi dan nasional

Tabel 3.3. Realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Nasional	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,15	76,49	103,81

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, capaian pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi IKLH mencapai 75,15, dibandingkan dengan standar nasional sebesar 76,49, sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 103,81%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah telah mendekati bahkan secara kinerja relatif mampu memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah berjalan efektif dan berada pada jalur yang sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Sementara itu, pada indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), realisasi yang digunakan masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya (tahun 2024) yaitu sebesar 20,20, dibandingkan dengan standar nasional sebesar 18,37. Namun demikian, tingkat capaian kinerja belum dapat dihitung secara langsung untuk tahun 2025 karena keterbatasan data realisasi terkini. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengukuran dan pelaporan kinerja untuk indikator tersebut masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam hal ketersediaan data yang tepat waktu dan akurat.

Secara umum, capaian indikator IKLH yang telah melampaui standar nasional menjadi gambaran positif terhadap kualitas lingkungan hidup di daerah. Namun, untuk indikator penurunan intensitas emisi GRK, diperlukan penguatan sistem monitoring dan pelaporan, serta peningkatan sinergi lintas sektor agar capaian kinerja dapat terukur secara optimal dan selaras dengan target nasional ke depan.

3.2.4.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah melalui pelaksanaan program dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, serta pengendalian emisi GRK sesuai dengan kewenangan daerah, termasuk inventarisasi GRK, pembinaan kepada kabupaten/kota, serta penginputan dan pelaporan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan indikator dapat selaras dengan target nasional. Apabila sampai dengan Tahun 2029 target belum tercapai, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah melalui evaluasi terhadap capaian kinerja, peningkatan efektivitas program dan kegiatan yang mendukung indikator, serta penyesuaian strategi dan perencanaan sesuai arahan Pemerintah Pusat dan hasil evaluasi, guna mendukung pencapaian target pada periode selanjutnya. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,19	75,15	110,20	**Faktor Pendorong** : Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan (area gambut dan minertal) yang mengakibatkan udara ambien dalam kondisi baik serta curah hujan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). **Faktor Penghambat** : Masih tingginya pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin sehingga terjadi penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Masih tingginya kadar DO di muara Sungai Musi I dan muara Sungai Musi II di Daerah Sungsang sehingga nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menurun.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Prov. Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Prov. Sumsel.
						Faktor Pendorong : adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, peningkatan efisiensi energi pada sektor industri, transportasi, dan perkantoran turut	Dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi, serta peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan

						berkontribusi dalam menurunkan jumlah emisi yang dihasilkan per unit kegiatan ekonomi. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya serap karbon. Di samping itu, mulai berkembangnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup menjadi faktor pendukung dalam upaya penurunan intensitas emisi GRK. **Faktor Penghambat :** masih tingginya ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil yang merupakan sumber utama emisi GRK. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi pada periode tertentu turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi. Keterbatasan anggaran dan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program mitigasi perubahan iklim, serta keterbatasan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, juga menjadi kendala. Selain itu, aktivitas ekonomi yang masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam berpotensi menghasilkan emisi yang cukup besar apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang optimal.	pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pendanaan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan juga perlu ditingkatkan. Di samping itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian target penurunan intensitas emisi GRK secara optimal dan berkelanjutan.

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian,

3.2.4.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 75,15 dari target 68,19, atau sebesar 110,20%. Capaian ini mengindikasikan bahwa sasaran "Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK" telah berhasil dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi belanja sebesar Rp1.517.647.343 dari total anggaran Rp1.777.305.554, atau sebesar 85,39%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap, namun tetap mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal.

Dengan demikian, diperoleh nilai efisiensi sebesar 129,05% yang termasuk dalam kategori efisien. Kondisi ini menggambarkan bahwa pencapaian kinerja yang melebihi target dapat diraih dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih hemat. Efisiensi ini mencerminkan adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, serta optimalisasi dalam pengelolaan anggaran.

Keberhasilan efisiensi tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan efektivitas pelaksanaan program pengendalian pencemaran lingkungan, optimalisasi kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran juga turut berkontribusi dalam menghasilkan output yang maksimal.

Tabel 3.5. Sandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan/ Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Nlai Efisiensi	Kategori
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,19	75,15	110,20	1.777.305.554	1.517.647.343	85,39	129,05	Efisien

Nilai efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Efisiensi = Capaian Kinerja (%) ÷ Serapan Anggaran (%) × 100

Interpretasi hasil:

Nilai Efisiensi	Interpretasi
> 100	Efisien
= 100	Berimbang
< 100	Kurang Efisien

Pada sasaran strategis ini, capaian kinerja mencapai 110,20% dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 85,39%. Berdasarkan perhitungan efisiensi, diperoleh nilai efisiensi sebesar 129,05. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pada sasaran tersebut tergolong efisien dan efektif, karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran.

Faktor pendukung efisiensi antara lain:

- Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kualitas lingkungan hidup yang tepat sasaran.
- Peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam upaya penurunan emisi GRK.
- Pemanfaatan anggaran secara selektif dan berbasis prioritas sehingga menghasilkan output yang maksimal.

Kendala yang dihadapi:

- Masih terbatasnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh.
- Adanya faktor eksternal seperti aktivitas industri dan perubahan penggunaan lahan yang sulit dikendalikan secara langsung.
- Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tergolong optimal, namun tetap perlu kapasitas fiskal yang lebih memadai sehingga dapat melakukan upgrade sumber daya.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan:

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan kompetensi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.
- Memperkuat pengawasan serta kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dan upaya penurunan emisi GRK secara berkelanjutan.

3.2.4.3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran *"Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK"* pada tahun 2025 yang tercermin dari realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 75,15 pada dasarnya merupakan hasil kontribusi dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara umum, program-program yang ada telah menunjukkan keterkaitan dan dinilai menunjang pencapaian sasaran, namun apabila ditelaah lebih lanjut, kontribusi antar kegiatan masih belum merata dan menunjukkan adanya kesenjangan tingkat capaian.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai program inti yang memiliki keterkaitan langsung dengan indikator IKLH belum sepenuhnya menunjukkan kinerja yang optimal pada seluruh kegiatan turunannya. Hal ini terlihat dari capaian kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masih rendah sebesar 11,92% serta kegiatan pemulihan yang baru mencapai 26,12%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya yang bersifat penanganan dan pemulihan dampak lingkungan belum berjalan secara maksimal, sehingga berpotensi mempengaruhi keberlanjutan peningkatan kualitas lingkungan. Sementara itu, kegiatan pencegahan menunjukkan capaian yang relatif lebih baik yaitu sebesar 56,92%, namun masih memerlukan penguatan agar mampu menekan potensi pencemaran secara lebih efektif sejak awal.

Di sisi lain, Program Perencanaan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan daerah. Namun demikian, belum tersedianya indikator kinerja yang terukur secara kuantitatif pada kegiatan ini menyebabkan kontribusinya sulit dievaluasi secara objektif dalam pengukuran kinerja, meskipun secara substantif memberikan dukungan yang signifikan terhadap pencapaian IKLH.

Program-program pendukung seperti peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup serta program penghargaan lingkungan hidup menunjukkan capaian yang tinggi, masing-masing di atas 90%. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi, kontribusi program tersebut masih bersifat tidak langsung terhadap peningkatan IKLH, sehingga dampaknya lebih terlihat dalam jangka menengah hingga panjang dan belum sepenuhnya memberikan pengaruh signifikan secara langsung terhadap indikator utama dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, meskipun capaian IKLH telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat kelemahan dalam pemerataan kontribusi antar kegiatan, khususnya pada aspek penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang belum optimal serta pada aspek pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya didukung oleh indikator yang terukur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis di lapangan, penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur dan evaluatif, serta peningkatan integrasi antar program agar seluruh intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang lebih langsung dan signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	IKLH	75,15	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**75,15**	**Menunjang**
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** **- Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**- 75,15** **- *69,29**	**Menunjang**
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	56,92	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11,92	Menunjang

				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	26,12	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya**	**90,12**	**Menunjang**
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi	95%	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup**	**95,29**	**Menunjang**
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	95%	

3.2.5. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Tahunan

3.2.5.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat melalui indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran misi, khususnya dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indikator yang digunakan adalah Persentase Penurunan Emisi GRK, baik secara kumulatif maupun tahunan, yang mencerminkan kontribusi daerah dalam mendukung target penurunan emisi nasional.

Dalam implementasinya, pengukuran indikator Persentase Penurunan Emisi GRK sangat dipengaruhi oleh metode perhitungan yang ditetapkan secara nasional. Perubahan kebijakan dan metodologi penghitungan emisi GRK, termasuk penyesuaian faktor emisi, cakupan sektor, serta pendekatan perhitungan berbasis inventarisasi GRK, mengakibatkan adanya penyesuaian dalam penyajian data kinerja. Hal ini menyebabkan capaian indikator kumulatif belum dapat disajikan secara lengkap (N/A), karena masih memerlukan proses verifikasi dan konsolidasi data lintas sektor serta sinkronisasi dengan sistem pelaporan nasional.

Untuk capaian tahunan, pada tahun 2025 target Persentase Penurunan Emisi GRK ditetapkan sebesar 31,02%**,** sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 32%**,** sehingga capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian emisi GRK yang dilaksanakan di daerah telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Program dan kegiatan yang mendukung capaian tersebut antara lain pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta peningkatan tutupan lahan.

Belum tersedianya data kumulatif secara lengkap tidak serta merta menunjukkan rendahnya kinerja, melainkan lebih disebabkan oleh dinamika dalam sistem pelaporan dan pengukuran yang masih memerlukan penyempurnaan. Penghitungan kumulatif membutuhkan data time series yang konsisten dan terverifikasi dari berbagai sektor, sehingga prosesnya memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan penghitungan tahunan.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terdapat di lapisan troposfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah. Gas rumah kaca secara alami terdapat di atmosfer yang menjaga suhu bumi tetap hangat, jika tanpa gas rumah kaca maka suhu di bumi akan sangat dingin dan sulit untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan mahkluk lain. Kegiatan manusia (anthropogenik) telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, bahkan telah menimbulkan gas-gas jenis baru dalam lapisan atmosfer. Jenis GRK yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global

adalah CO2, CH4,N2O, HFCs, PFCs, dan SF6. Dari semua gas tersebut yang menjadi GRK utama adalah CO2, CH4 dan N2O.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 telah meratifikasi konvensi perubahan iklim, dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan United Nations Framework Convention On Climate Change(UNFCCC) yang merupakan kerangka kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut. Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2020 dengan target mencapai 26 % pada tahun 2020. Ketika target penurunan tersebut di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang telah diundangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dijabarkan bahwa target penurunan sebesar 10,16 % dari BAU hingga tahun 2020.

Target penurunan emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan meliputi lima sektor prioritas; Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi yang meliputi transportasi dan Industri, serta Pengolahan Limbah. Di dalam pertemuan Conference of The Parties (COP) yang ke 21 di Paris Perancis, Negara yang hadir harus membuat suatu komitmen baru untuk implementasi penurunan emisi GRK yang diharapkan tidak membuat kenaikan suhu hingga 2oC. Dalam pertemuan tersebut dibuatlah Intended Nationally. Determined Contribution (INDC) dari Indonesia. Target yang baru penurunan emisi GRK di Indonesia diubah menjadi 29 % tanpa bantuan dana dari luar atau 41 % dengan bantuan donor.

Seiring dengan perkembangan masa, rencana aksi daerah yang dicanangkan pada tahun 2012, telah mendekati akhir pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim tahun 2012, akan difinalisasi pada tahun 2020, sehingga harus dibuat suatu rencana baru yang akan dilaksanakan saat berakhirnya tahun 2020 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kaji ulang RAD GRK melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030 dengan target penurunan sebesar 11,79 % dari BAU hingga tahun 2030.

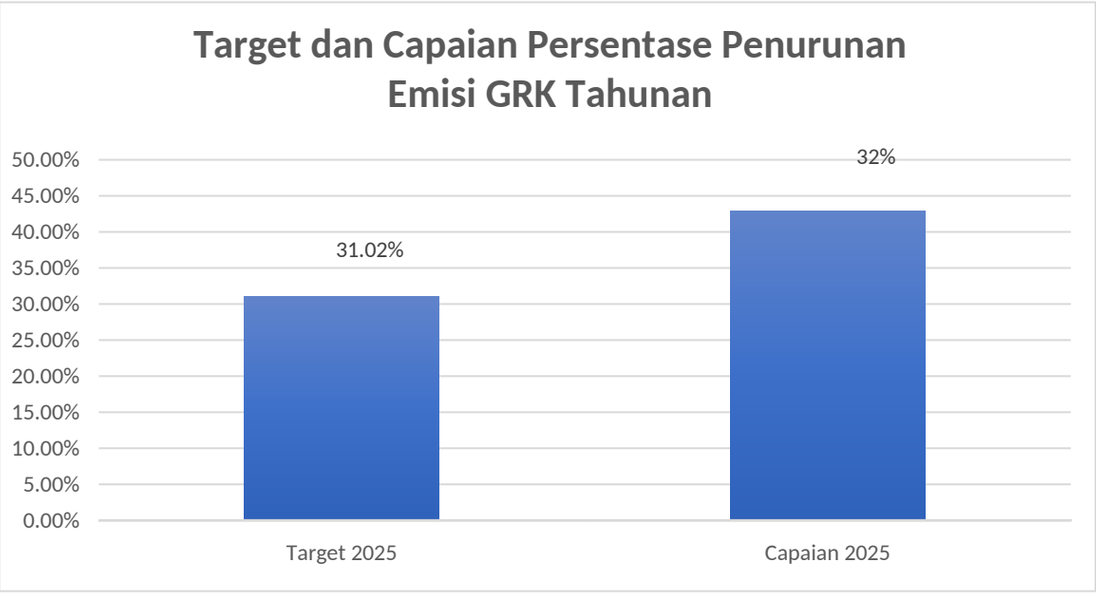
Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tercapainya target nasional menurunkan emisi GRK. Inventarisasi GRK menjadi hal

yang penting dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi GRK menjadi krusial karena menggambarkan seluruh emisi yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian melalui pelaksanaan RAD GRK dapat menurunkan jumlah emisi GRK namun belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang tidak dikendalikan tumbuh melampaui upaya penurunan emisi GRK. Informasi tersebut hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang dikendalikan maupun tidak.

Upaya inventarisasi menjadi koreksi untuk pengendalian emisi GRK secara keseluruhan. Melalui inventarisasi emisi GRK ini neraca emisi GRK selama satu tahun dapat dikuantifikasikan untuk menjadi pertimbangan bagi arah pengendalian yang lebih efektif. Agar inventarisasi emisi GRK dapat menjadi alat pantau yang efektif maka penyusunan inventarisasi emisi GRK dilakukan menurut Pedoman Inventarisasi Emisi GRK Nasional sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Melalui peraturan ini, penyusunan inventarisasi GRK menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan.

Grafik 3.2. Sandingan Target dan Capaian Persentase Penurunan Emisi GRK Tahun 2025



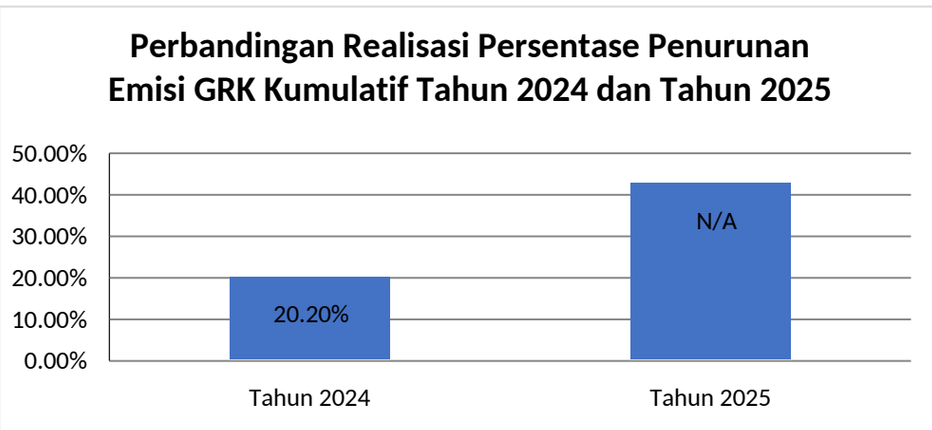
Secara umum, capaian penurunan emisi GRK tahunan yang telah melampaui target menunjukkan tren yang positif dan mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung penurunan emisi secara nasional. Namun demikian, ke depan diperlukan penguatan dalam sistem inventarisasi GRK daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyempurnaan metode pengumpulan dan validasi data agar capaian kumulatif dapat terukur secara akurat dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang lebih komprehensif. Selain itu, konsistensi pelaksanaan program penurunan emisi perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar kontribusi daerah terhadap target nasional dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

3.2.5.2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja penurunan Emisi GRK Kumulatif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 memiliki nilai sebesar 20,20 dan berbeda dengan Realisasi kinerja penurunan Emisi GRK Kumulatif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang hasilnya belum dapat diketahui karena masih dilakukan perhitungan secara nasional. Namun terjadi peningkatan target pada tahun 2025 yakni 18,50% sedangkan target tahun 2024 adalah 8,04%.

Realisasi kinerja indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 belum memiliki target karena merupakan indikator baru yang mulai diterapkan dalam pengukuran kinerja. Pada tahun 2025, indikator ini telah memiliki target sebesar 31,02% dengan realisasi yang dicapai sebesar 32%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator penurunan emisi GRK tahunan pada tahun 2025 telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian emisi GRK yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik sejak awal penerapan indikator tersebut.

Grafik 3.3. Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2024 dan Tahun 2025



Tabel 3.7. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan Tahun 2024 dan 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	8,04	20,20	251,24	18,50	N/A	-
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	n/a	n/a	n/a	31,02	32	103,15

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3.2.5.3. Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target 2025 Sesuai Renstra

Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan tahunan dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3.8. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	N/A	18,50	-
		Persentase Penurunan Emisi GRK tahunan	32	31,02	103,15

Realisasi kinerja indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif dan Tahunan menunjukkan capaian yang bervariasi apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif, capaian tahun 2025 belum dapat disajikan (N/A) karena proses perhitungan dan validasi data masih dilakukan secara nasional oleh Bappenas. Meskipun demikian, target akhir tahun 2025 sebesar 18,50% tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian emisi GRK di daerah. Belum tersedianya data capaian ini disebabkan oleh kompleksitas

penghitungan yang memerlukan konsolidasi data lintas sektor dan lintas wilayah secara nasional, sehingga tingkat kemajuan belum dapat diukur secara kuantitatif.

Sementara itu, untuk indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan, capaian tahun 2025 sebesar 32% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 31,02%, dengan tingkat kemajuan mencapai 103,15%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di daerah telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian target jangka menengah. Keberhasilan capaian indikator tahunan ini mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program pengendalian emisi GRK, serta dukungan dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi. Di sisi lain, belum tersedianya data kumulatif menunjukkan perlunya penguatan sistem inventarisasi dan pelaporan emisi GRK agar ke depan capaian kinerja dapat diukur secara lebih komprehensif. Secara keseluruhan, meskipun capaian indikator kumulatif belum dapat disajikan, capaian indikator tahunan yang telah melampaui target menunjukkan bahwa kinerja pengendalian emisi GRK berada pada arah yang positif dan mendukung pencapaian target jangka menengah dalam Renstra.

3.2.5.4. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi kinerja indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif pada tahun 2024 sebesar 20,20% apabila dibandingkan dengan standar nasional sebesar 27,3% menunjukkan tingkat capaian sebesar 73,99%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja daerah masih berada di bawah target atau standar yang ditetapkan secara nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya penurunan emisi GRK telah dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang positif, namun kontribusi daerah masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai atau mendekati target nasional. Perbedaan capaian ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan implementasi aksi mitigasi di beberapa sektor, belum optimalnya pengendalian emisi pada sektor prioritas, serta adanya keterbatasan dalam sistem pengumpulan dan pelaporan data emisi.

Selain itu, perbedaan metode perhitungan, kelengkapan data, serta tingkat partisipasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan juga dapat mempengaruhi hasil capaian yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas inventarisasi emisi GRK, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kinerja belum memenuhi standar nasional, tren penurunan emisi yang telah dicapai tetap menunjukkan arah yang positif. Diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan agar capaian kinerja dapat meningkat dan selaras dengan target nasional yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9. Realisasi kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Nasional	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	20,20	27,3%	73,99

3.2.5.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang dilakukan

Capaian kinerja indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif pada tahun 2025 belum dapat disajikan (N/A), karena proses perhitungan dan validasi data masih dilakukan secara nasional oleh Bappenas. Meskipun demikian, target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 18,50% tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengendalian emisi GRK di daerah. Belum tersedianya data realisasi kumulatif ini lebih disebabkan oleh mekanisme penghitungan yang memerlukan konsolidasi data lintas sektor dan lintas wilayah secara nasional, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.

Sementara itu, untuk indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan, pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 31,02% dengan realisasi yang dicapai sebesar 32%, sehingga capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di daerah telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi GRK.

Keberhasilan capaian indikator tahunan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pengendalian emisi, seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta peningkatan tutupan lahan. Di sisi lain, belum tersedianya data kumulatif menegaskan pentingnya penguatan sistem inventarisasi dan pelaporan emisi GRK agar ke depan capaian kumulatif dapat diukur secara lebih akurat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kumulatif belum dapat disajikan, keberhasilan capaian tahunan yang melampaui target menunjukkan tren kinerja yang

positif. Hal ini menjadi indikasi bahwa upaya pengendalian emisi GRK di daerah berada pada jalur yang tepat dan perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	18,50	N/A	-	Tim Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan baik namun masih melakukan proses penginputan hasil aksi mitigasi pada Aplikasi AKSARA Bappenas	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis serta validasi data mengenai Inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca lebih lanjut pada Kementerian KLHK, OPD terkait, DLH Kab/Kota dan Dunia Usaha.
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	31,02	32	103,15	Pelaksanaan aksi mitigasi penurunan emisi GRK tahunan di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik dan terkoordinasi, didukung oleh implementasi program pada sektor prioritas seperti kehutanan dan lahan, energi, serta pengelolaan limbah, sehingga capaian kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelaporan aksi mitigasi melalui sistem yang terintegrasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penurunan emisi GRK oleh OPD terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha.

3.2.5.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Sandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan/ Sasaran Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	18,50	N/A	-	75.000.000	74.950.330	99,93	-

Tabel 3.12. Capaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**68,19%**	**75,15%**	**103,15**	**1.777.305.554,00**	**1.517.647.343,00**	**85,39**	**82,78**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	1.064.919.553,00	950.120.708,00	89,22	89,22
	Penanggulangan	100%	100%	100%	223.060.001,00	218.645.627,00	98,02	98,02

	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	489.326.000,00	348.881.008,00	71,30	71,30

3.2.5.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.13. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK	20,20	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Persentase Penurunan Emisi GRK	251,24	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang

Tabel 3.14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1.777.305.554,00**	**1.517.647.343,00**	**85,39**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.064.919.553,00	950.120.708,00	89,22
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	223.060.001,00	218.645.627,00	98,02
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup	489.326.000,00	348.881.008,00	71,30

3.2.6. INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

3.2.6.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat melalui indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran misi, khususnya dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah. Indikator yang digunakan adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah**,** yang mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu.

Pada tahun 2025, target Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah ditetapkan sebesar 45**,** sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **67**, sehingga capaian kinerja mencapai 148,89%**.** Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa program dan kegiatan pengelolaan sampah berjalan dengan sangat baik, didukung oleh peningkatan sistem pengurangan sampah, penanganan sampah, serta partisipasi masyarakat.

Secara umum, capaian yang melampaui target ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan sampah dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

3.2.6.2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah pada tahun 2024 sebesar 20,20 dari target 8,04, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 67 dari target 45. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan baik dari sisi target maupun realisasi.

Tabel 3.15. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	8,04	20,20		45	67	

3.2.6.3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar **67** telah melampaui target jangka menengah dalam Renstra yang ditetapkan sebesar **45**.

Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Tabel 3.16. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	67	45	148,89

3.2.6.4. Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Untuk indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, Provinsi Sumatera Seelatan sudah melampaui capaian nasional seperti yang disajikan pada tabel 3.17. berikut.

Tabel 3.17. Realisasi kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Nasional	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	67	32,90	203,64

3.2.6.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah pada tahun 2025 sebesar **67** dari target **45** menunjukkan keberhasilan yang sangat baik.

Tabel 3.18. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45	67	148,89	Peningkatan Sistem pengelolaan sampah, optimalisasi penguranangan sampah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat.	Peningkatan sarana prasarana, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu.

3.2.6.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum, capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien.

Tabel 3.19. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	**Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi GRK**	**45**	**67**	**148,89**	**232.073.000,00**	**171.999.073,00**	**74,11**

3.2.6.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.20. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	**Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi GRK**	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	148,89	Program Pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	148,89	Menunjang
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	148,89	Menunjang

3.2.7. Pengelolaan Sampah (Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolah Sampah)

3.2.7.1. *Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)*

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran dan Persentase Capaian Program Pengelolaan Sampah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1.	**Program Pengelolaan Sampah**	**232.073.000,00**	**171.999.073,00**	**74,11**
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	232.073.000,00	171.999.073,00	74,11

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada indikator Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah) menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 21%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 6,7%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 31,90%.

Rendahnya capaian tersebut bukan sepenuhnya mencerminkan kinerja pengelolaan sampah yang tidak optimal, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan data yang masuk, dimana hanya sebagian kabupaten/kota yang menyampaikan laporan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah. Kondisi ini menyebabkan capaian yang terhitung belum menggambarkan kondisi sebenarnya secara menyeluruh.

3.2.7.2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja lebih difokuskan pada pencapaian terhadap target tahun berjalan.

Tabel 3.22. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indikator Kinerja Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah				21	6,7	31,90

Keterangan: T = Target, R = Realisasi, C = Capaian

3.2.7.3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar **6,7%** masih berada di bawah target jangka menengah dalam Renstra sebesar **45%**, sehingga tingkat kemajuan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.23. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah	6,7	45%	14,89

3.2.7.4. Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar **24%**, capaian daerah sebesar **6,7%** masih berada jauh di bawah target nasional.

Tabel 3.24. Realisasi kinerja Timbulan sampah terolah Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah	6,7	24%	27,92

3.2.7.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Tabel 3.25. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah	21%	6,7%	31,90	Data belum lengkap dari Kab/Kota, keterbatasan fasilitas pengolahan, belum optimalnya sistem pelaporan	Peningkatan koordinasi dan pembinaan Kab/Kota, penguatan sistem pelaporan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah, serta digitalisasi data persampahan

Capaian indikator yang masih rendah dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem pelaporan data dari kabupaten/kota, dimana tidak seluruh daerah menyampaikan data timbulan sampah terolah secara lengkap. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengolahan sampah serta belum meratanya infrastruktur pengelolaan sampah turut mempengaruhi rendahnya capaian.

3.2.7.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Meskipun capaian kinerja belum optimal, penggunaan sumber daya tetap perlu dilihat dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dengan asumsi realisasi anggaran mendekati pagu, maka efisiensi belum sepenuhnya tercapai karena output yang dihasilkan masih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.26. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah	21%	6,7%	31,90	232.073.000	171.999.073	74,11

3.2.7.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.27. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	**Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi GRK**	Timbulan sampah terolah	31,90	Program Pengelolaan sampah	Pengelolaan Sampah		Menunjang
				Pengurangan Sampah	Persentase pengurangan sampah	100%	Menunjang
				Penanganan Sampah	Persentase penanganan sampah	80%	Menunjang
				Pengelolaan fasilitas pengolahan sampah	Jumlah fasilitas aktif		Menunjang

Tabel 3.28. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	**Program Pengelolaan Sampah**	**232.073.000,00**	**171.999.073,00**	**74,11**
	Pengurangan Sampah			
	Penanganan Sampah			
	Fasilitas Pengolahan Sampah			

3.2.8. Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulah sampah (%RT)

3.2.8.1. *Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)*

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 43%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 17%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 39,53%.

Rendahnya capaian ini tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja pengelolaan persampahan yang belum optimal, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan data yang dilaporkan oleh kabupaten/kota. Tidak seluruh daerah menyampaikan data cakupan layanan pengumpulan sampah secara lengkap, sehingga capaian yang terhitung belum menggambarkan kondisi riil di lapangan secara menyeluruh.

3.2.8.2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada pencapaian terhadap target tahun berjalan.

Tabel 3.29. Sandingan Target, Realisasi, Proporsi RT Terlayani Pengumpulan Sampah Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani pengumpulan sampah	n/a	n/a	n/a	43%	17%	39,53

3.2.8.3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 17% masih berada di bawah target jangka menengah dalam Renstra sebesar 45%**,** sehingga tingkat kemajuan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Tabel 3.29. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani	17%	45%	37,78

3.2.8.4. Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk indikator ini, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menjadi acuan pembanding, sehingga evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian target daerah.

Tabel 3.30. Realisasi kinerja Proporsi RT Terlayani Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani	17%	n/a	n/a

3.2.8.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Capaian indikator yang masih rendah dipengaruhi oleh belum optimalnya cakupan layanan pengumpulan sampah serta keterbatasan data dari kabupaten/kota. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, belum meratanya layanan persampahan, serta rendahnya tingkat pelaporan data menjadi faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja

Tabel 3.31. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani	43%	17%	39,53	Ketebatasan data Kab/Kota, belum meratanya layanan pengumpulan sampah, serta keterbatasan sarana prasarana	Peningkatan cakupan layanan, penguatan sarana prasarana, peningkatan koordinasi pelaporan, dan digitalisasi sistem persampahan

3.2.8.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan capaian kinerja yang masih rendah dibandingkan target, maka penggunaan sumber daya belum sepenuhnya efisien, karena output yang dihasilkan belum sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Tabel 3.32. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani	43%	17%	39,53			

3.2.8.7. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Tabel 3.33. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	**Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi GRK**	Proporsi RT terlayani	39,53	Program Pengelolaan sampah	Cakupan layanan sampah	-	Menunjang
				Pengumpulan sampah	Persentase wilayah terlayani	70%	Menunjang
				Pengangkutan sampah	Frekuensi layanan	80%	Menunjang
				Penyediaan sarana	Jumlah armada/fasilitas	-	Menunjang

Tabel 3.34. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	**Program Pengelolaan Sampah**	**232.073.000,00**	**171.999.073,00**	**74,11**
	Pengumpulan Sampah			
	Pengangkutan Sampah			
	Sarana Prasarana			

3.2.9. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

3.2.9.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 95%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 90%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 94,74%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan administrasi pertanahan telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penataan administrasi pertanahan telah dilaksanakan secara optimal, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kelengkapan data dan tertib administrasi di tingkat lapangan.

3.2.9.2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja difokuskan pada pencapaian terhadap target tahun berjalan.

Tabel 3.35. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	*n/a	*n/a	*n/a	95%	90%	94,74

* Indikator baru tahun 2025

3.2.9.3. Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam renstra

Realisasi Indeks Tertib Administrasi Pertanahan tahun 2025 sebesar 90% telah mencapai target jangka menengah dalam Renstra yang ditetapkan sebesar 90%**,** sehingga tingkat kemajuan mencapai 100%**.**

Tabel 3.36. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	90%	90%	100

3.2.9.4. Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Untuk indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menjadi acuan pembanding, sehingga evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian target daerah.

Tabel 3.37. Realisasi kinerja Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	90%		

3.2.9.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Capaian indikator yang mendekati target dipengaruhi oleh meningkatnya penataan administrasi pertanahan, termasuk perbaikan sistem pencatatan, pengelolaan data, dan koordinasi antar instansi terkait. Namun demikian, belum tercapainya target secara penuh disebabkan oleh masih adanya kendala dalam kelengkapan data pertanahan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem digitalisasi administrasi pertanahan.

Tabel 3.38. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	95%	90%	94,74	Sistem administrasi sudah berjalan baik, namun masih terdapat keterbatasan data dan SDM	Peningkatan digitalisasi data, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan koordinasi antar instansi

3.2.9.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan capaian kinerja yang mendekati target, penggunaan sumber daya dapat dikategorikan cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mampu menghasilkan output yang optimal dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efektif.

Tabel 3.39. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	95%	90%	94,74	800.000.000	720.000.000	90,00

3.2.9.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.40. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	94,74	Program Penataan Administrasi Pertanahan	Tertib administrasi	-	Menunjang
				Pendataan Inventarisasi Tanah	Kelengkapan data	90%	Menunjang
				Digitalisasi Data Pertanahan	Sistem informasi	85%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah kegiatan	100%	Menunjang

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Realisasi anggaran menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berikut disajikan tabel capaian anggaran program dan kegiatan tahun 2025.

Tabel 3.41. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**	**192.719.597,00**	**72.774.785,00**	**37,76**
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi	192.719.597,00	72.774.785,00	37,76
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	**50.079.435,00**	**48.482.000,00**	**96,81**
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	50.079.435,00	48.482.000,00	96,81
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	**88.381.493,00**	**70.074.998,00**	**79,29**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	88.381.493,00	70.074.998,00	79,29
	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	**113.216.966,00**	**105.351.722,00**	**93,05**

	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	113.216.966,00	105.351.722,00	93,05
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	**143.640.445,00**	**122.421.677,00**	**85,23**
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	80.883.445,00	70.247.019,00	86,85
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	62.757.000,00	52.174.658,00	83,14
	Program Penatagunaan Tanah	**80.767.445,00**	**73.287.063,00**	**90,74**
	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	80.767.445,00	73.287.063,00	90,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	**47.401.945.272,50**	**14.212.562.915,00**	**29,98**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.209.160,00	185.628.222,00	90,90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.357.560.000,00	11.933.460.534,00	89,34
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.426.000,00	7.350.000,00	77,98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.904.000,00	61.615.271,00	75,23
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.353.056,00	614.728.367,00	77,29

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.255.576.800,00	1.019.470.465,00	81,20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	425.706.500,00	390.310.056,00	91,69
	Peningkatan Pelayanan BLUD	31.272.209.756,50	31.103.826.923,00	99,46
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**0**	**0**	**0**
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	0	0	0
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**1.777.305.554,00**	**1.517.647.343,00**	**85,39**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.064.919.553,00	950.120.708,00	89,22
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	223.060.001,00	218.645.627,00	98,02
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	489.326.000,00	348.881.008,00	71,30
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	**95.553.955,30**	**79.372.309,00**	**83,07**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	95.553.955,30	79.372.309,00	83,07

	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	**101.092.000,00**	**100.341.488,00**	**99,26**
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	101.092.000,00	100.341.488,00	99,26
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**12.000.000,00**	**11.777.998,00**	**98,15**
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	12.000.000,00	11.777.998,00	98,15
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**561.221.561,00**	**505.768.457,00**	**90,12**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	561.221.561,00	505.768.457,00	90,12
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	**629.931.592,00**	**600.279.891,00**	**95,29**

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	629.931.592,00	600.279.891,00	95,29
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**170.915.487,00**	**161.308.685,00**	**94,38**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	170.915.487,00	161.308.685,00	94,38
	Program Pengelolaan Persampahan	**232.073.000,00**	**171.999.073,00**	**74,11**
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	232.073.000,00	171.999.073,00	74,11

TABEL 3.42

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Kinerja	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi (indeks)	71,93	72,69	101,05	68,19	75,15	110,20
2	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	8,04	20,20	251,24	18,50	N/A	-
3	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	N/A	N/A	N/A	31,02	32,00	103,15
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	8,04	20,20	251,24	45,00	67,00	148,89
5	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (%)	N/A	N/A	N/A	21,00	6,70	31,90
6	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	N/A	N/A	N/A	43,00	17,00	39,53
7	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (%)	N/A	N/A	N/A	95,00	90,00	94,74

Keterangan: T = Target; R = Realisasi; C = Capaian; N/A = data belum tersedia atau indikator belum digunakan pada tahun bersangkutan.

Narasi Penjelasan Tabel

Gambaran Umum Capaian

Berdasarkan Tabel 3.42, dari tujuh indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2025, enam indikator telah memiliki data realisasi dan dapat dihitung tingkat capaiannya. Realisasi indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif belum tersedia karena proses penghitungan dan validasinya dilakukan secara nasional. Dari enam indikator yang dapat diukur, tiga indikator melampaui target, yaitu IKLH Provinsi sebesar 110,20%, Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan sebesar 103,15%, dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar 148,89%.

Perkembangan IKLH Provinsi

Realisasi IKLH Provinsi meningkat dari 72,69 pada tahun 2024 menjadi 75,15 pada tahun 2025 atau naik 2,46 poin. Walaupun target tahun 2025 disesuaikan dari 71,93 menjadi 68,19 karena perubahan metode perhitungan, persentase capaian meningkat dari 101,05% menjadi 110,20%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kualitas lingkungan hidup tahun 2025 tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah menunjukkan peningkatan realisasi yang signifikan, yaitu dari 20,20 pada tahun 2024 menjadi 67,00 pada tahun 2025 atau naik 46,80 poin. Persentase capaian terhadap target menurun dari 251,24% menjadi 148,89%, namun penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan target yang cukup besar, dari 8,04 pada tahun 2024 menjadi 45,00 pada tahun 2025. Dengan demikian, secara absolut kinerja pengelolaan sampah meningkat dan target tahun 2025 tetap berhasil dilampaui.

Penurunan Emisi GRK

Untuk indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif, realisasi tahun 2024 sebesar 20,20% telah melampaui target 8,04% dengan capaian 251,24%. Pada tahun 2025 target meningkat menjadi 18,50%, namun realisasinya belum dapat disajikan sehingga perbandingan langsung belum dapat dilakukan. Sementara itu, indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan mulai digunakan pada tahun 2025 dan mencapai realisasi 32,00% dari target 31,02%, atau sebesar 103,15%.

Indikator Baru Tahun 2025

Tiga indikator lain yang mulai digunakan pada tahun 2025 belum memiliki data pembanding tahun 2024. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah mencapai 31,90% dari target, Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mencapai 39,53%, dan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan mencapai 94,74%. Penguatan perlu diprioritaskan pada peningkatan fasilitas pengolahan sampah, perluasan cakupan layanan pengumpulan sampah, perbaikan kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan kabupaten/kota, serta penyelesaian aspek administrasi pertanahan yang masih menjadi kesenjangan terhadap target.

Kesimpulan dan Arah Tindak Lanjut

Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam. Keberhasilan pada IKLH, penurunan emisi GRK tahunan, dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah perlu dipertahankan, sedangkan indikator yang belum mencapai target memerlukan rencana tindak lanjut yang terukur. Konsistensi definisi operasional, sumber data, metode penghitungan, dan ketersediaan data antarperiode juga perlu diperkuat agar perbandingan kinerja tahun berikutnya dapat dilakukan secara lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.4 ANALISIS TREN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023-2025

Analisis tren disusun dengan membandingkan target, realisasi, dan persentase capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, 2024, dan 2025. Perbandingan memperhatikan perubahan dokumen perencanaan, nomenklatur indikator, definisi operasional, serta metode pengukuran agar interpretasi capaian tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

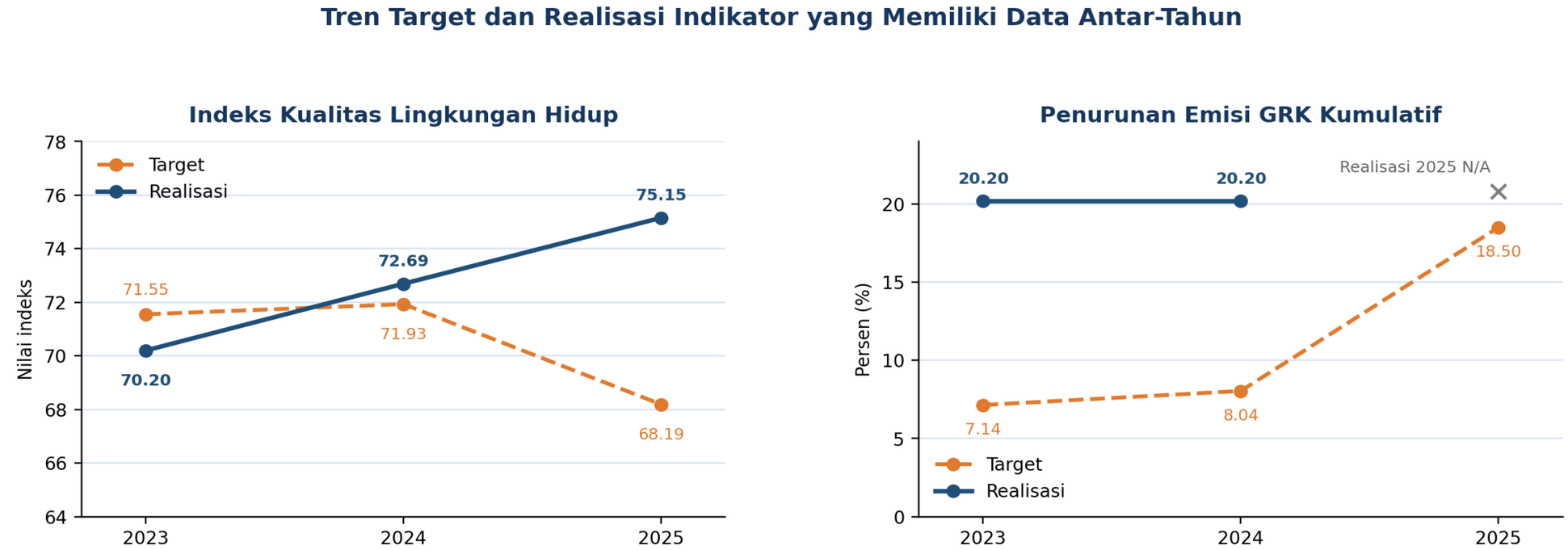
Tabel 3.43. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian IKU Tahun 2023-2025

No.	Indikator Kinerja Utama	2023			2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	71,55	70,20	98,11	71,93	72,69	101,05	68,19	75,15	110,20
2	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	7,14	20,20	282,91	8,04	20,20	251,24	18,50	N/A	N/A
3	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31,02	32,00	103,15
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45,00	67,00	148,89
5	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21,00	6,70	31,90
6	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43,00	17,00	39,53
7	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,00	90,00	94,74

Keterangan: T = Target; R = Realisasi; C = Capaian; N/A = data tidak tersedia atau indikator belum digunakan. Persentase capaian dihitung dari realisasi dibandingkan target.

Sumber: LKjIP DLHP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, 2024, dan 2025 (diolah).

Grafik 3.4. Tren Target dan Realisasi IKLH serta Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2023-2025



Catatan: Grafik hanya menampilkan indikator yang memiliki data antar-tahun. Lima IKU lainnya baru digunakan pada tahun 2025 sehingga belum dapat dibentuk tren tiga tahun

3.4.1 Narasi Penjelasan Tabel 3.43

Tabel 3.43 menunjukkan bahwa dari tujuh IKU yang digunakan pada tahun 2025, hanya IKLH yang memiliki rangkaian data target, realisasi, dan capaian secara lengkap selama 2023-2025. Indikator penurunan emisi GRK kumulatif memiliki data tahun 2023 dan 2024, sedangkan realisasi tahun 2025 belum tersedia. Lima indikator lainnya mulai digunakan pada tahun 2025 sehingga analisisnya difokuskan pada pencapaian tahun berjalan dan kesiapan pembentukan data dasar untuk analisis tren pada periode berikutnya.

1. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

    - **Analisis tren**. Realisasi IKLH meningkat konsisten dari 70,20 pada tahun 2023 menjadi 72,69 pada tahun 2024 dan 75,15 pada tahun 2025. Persentase capaian juga membaik dari 98,11% menjadi 101,05% dan 110,20%. Dengan demikian, kinerja berubah dari belum mencapai target pada tahun 2023 menjadi melampaui target pada tahun 2024 dan 2025. Secara komponen, peningkatan tahun 2025 terutama ditopang oleh kenaikan IKA dan IKL, meskipun IKU dan IKAL menurun dibandingkan tahun 2024.
    - **Faktor pendukung**. Perbaikan kondisi kebakaran hutan dan lahan, curah hujan yang mendukung, pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan, serta koordinasi program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
    - **Kendala**. Tekanan pencemaran air sungai dari kegiatan pertambangan dan sektor lainnya, kondisi kualitas air laut pada muara Sungai Musi, perubahan penggunaan lahan, serta perubahan metode perhitungan IKLH pada tahun 2025.
    - **Langkah tindak lanjut**. Memperkuat pengawasan dan penegakan kepatuhan lingkungan, memperluas titik serta konsistensi pemantauan air dan udara, mempertahankan pengendalian karhutla dan tutupan lahan, serta menyajikan rekonsiliasi metode lama dan metode baru agar tren dapat dibaca secara tepat.

2. **Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif**

    - **Analisis tren**. Realisasi tahun 2023 dan 2024 berada pada angka yang sama, yaitu 20,20%. Namun, persentase capaian turun dari 282,91% menjadi 251,24% karena target meningkat dari 7,14% menjadi 8,04%. Tahun 2025 belum dapat dinilai karena realisasi masih N/A, meskipun target meningkat menjadi 18,50%.
    - **Faktor pendukung**. Koordinasi Tim Pembangunan Rendah Karbon/Pokja AKSARA, penginputan aksi mitigasi lintas sektor, pelaksanaan inventarisasi GRK, serta validasi data dengan perangkat daerah, kabupaten/kota, dan dunia usaha.
    - **Kendala**. Perhitungan kumulatif memerlukan konsolidasi dan validasi data lintas sektor secara nasional sehingga hasil tahun berjalan tidak selalu tersedia pada saat penyusunan LKjIP.
    - **Langkah tindak lanjut**. Menetapkan jadwal cut-off data, penanggung jawab data per sektor, mekanisme rekonsiliasi sebelum penyusunan LKjIP, dan koordinasi berkala dengan Bappenas/Kementerian terkait agar realisasi kumulatif dapat disajikan tepat waktu.

3. **Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan**

    - **Analisis tren**. Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2025. Realisasi sebesar 32,00% melampaui target 31,02%, dengan capaian 103,15%. Karena belum

terdapat data tahun 2023 dan 2024 dengan definisi yang sama, hasil ini belum dapat dinyatakan sebagai tren tiga tahun.

- **Faktor pendukung**. Pelaksanaan aksi mitigasi pada sektor kehutanan dan lahan, energi, serta pengelolaan limbah, disertai koordinasi dan pelaporan aksi mitigasi.
- **Kendala**. Kualitas dan ketepatan waktu pelaporan lintas sektor belum seragam, serta kapasitas inventarisasi dan verifikasi data masih perlu diperkuat.
- **Langkah tindak lanjut.** Mempertahankan aksi mitigasi yang efektif, meningkatkan kualitas verifikasi data, mengintegrasikan pelaporan antarperangkat daerah, dan menetapkan tahun 2025 sebagai baseline untuk analisis tren berikutnya.

4. **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah**

- **Analisis tren**. Indikator ini baru digunakan pada tahun 2025. Realisasi mencapai 67,00 dari target 45,00 atau 148,89%. Data LKjIP 2023 dan 2024 tidak memuat indikator dengan nomenklatur dan formula yang sama sehingga perbandingan antar-tahun tidak dilakukan.
- **Faktor pendukung**. Peningkatan sistem pengelolaan sampah, optimalisasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta partisipasi masyarakat.
- **Kendala**. Ketersediaan sarana dan prasarana belum merata, kualitas data kabupaten/kota belum seragam, dan diperlukan konsistensi penerapan formula indeks.
- **Langkah tindak lanjut**. Memperkuat regulasi dan pembinaan, meningkatkan sarana pengelolaan sampah, memperluas edukasi dan partisipasi masyarakat, mendigitalisasi pelaporan, serta mendokumentasikan formula dan sumber data secara konsisten.

5. **Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah**

- **Analisis tren**. Indikator ini baru digunakan pada tahun 2025. Realisasi sebesar 6,70% dari target 21,00% menghasilkan capaian 31,90%, sehingga target tahun berjalan belum tercapai dan tren tiga tahun belum dapat disusun.
- **Faktor pendukung**. Tersedianya program pengelolaan persampahan, kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, serta sebagian fasilitas pengolahan yang telah beroperasi.
- **Kendala**. Tidak seluruh kabupaten/kota menyampaikan data secara lengkap, fasilitas pengolahan dan infrastruktur belum merata, serta sistem pelaporan belum optimal.
- **Langkah tindak lanjut**. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kabupaten/kota, menetapkan standar serta jadwal pelaporan, memverifikasi data secara berkala, dan mendorong pembangunan atau optimalisasi fasilitas pengolahan sampah.

6. **Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**

- **Analisis tren**. Indikator ini baru digunakan pada tahun 2025. Realisasi sebesar 17,00% dari target 43,00% menghasilkan capaian 39,53%. Belum adanya data

dengan definisi yang sama pada tahun 2023 dan 2024 menyebabkan tren tiga tahun belum dapat disajikan.

- **Faktor pendukung**. Adanya layanan pengumpulan sampah pada sebagian wilayah serta dukungan program pengelolaan persampahan.
- **Kendala.** Cakupan layanan belum merata, sarana angkut dan fasilitas pendukung terbatas, serta data cakupan layanan dari kabupaten/kota belum lengkap.
- **Langkah tindak lanjut**. Memperluas cakupan layanan, meningkatkan sarana pengumpulan dan pengangkutan, memperkuat koordinasi pelaporan, serta membangun basis data rumah tangga terlayani yang terverifikasi.

7. **Indeks Tertib Administrasi Pertanahan**

- **Analisis tren**. Indikator ini baru digunakan pada tahun 2025. Realisasi sebesar 90,00% dari target 95,00% menghasilkan capaian 94,74%. Capaian mendekati target, namun belum dapat dibandingkan sebagai tren tiga tahun karena LKjIP 2023 dan 2024 menggunakan indikator pertanahan yang berbeda.
- **Faktor pendukung**. Sistem pencatatan dan pengelolaan administrasi telah berjalan, disertai koordinasi dengan instansi terkait dan upaya penataan data pertanahan.
- **Kendala.** Kelengkapan data belum merata, kapasitas sumber daya manusia terbatas, dan digitalisasi administrasi pertanahan belum optimal.
- **Langkah tindak lanjut.** Mempercepat digitalisasi serta validasi data, meningkatkan kompetensi petugas, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan menetapkan baseline tahun 2025 untuk pengukuran tren periode berikutnya.

Catatan Keterbandingan dan Perubahan Indikator

Perbandingan tiga tahun harus dibaca dengan memperhatikan transisi dokumen perencanaan dari Renstra 2019-2023, Renstra 2024-2026, dan Renstra 2025-2029. Pada IKLH, perubahan metode perhitungan nasional tahun 2025 mencakup penambahan parameter dan perubahan metode pada komponen IKU, IKA, dan IKL; oleh karena itu, kenaikan nilai tetap perlu disertai penjelasan metodologis. Pada indikator GRK, pemisahan indikator kumulatif dan tahunan mulai digunakan pada tahun 2025. Sementara itu, indikator pengelolaan sampah dan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan merupakan indikator baru atau menggunakan definisi berbeda dari indikator tahun sebelumnya. Data yang tidak sebanding tidak dipaksakan menjadi angka tren dan dinyatakan N/A.

Kesimpulan Tren

Secara keseluruhan, IKLH menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama 2023-2025. Penurunan emisi GRK kumulatif menunjukkan realisasi yang stabil pada 2023-2024, tetapi tren sampai 2025 belum dapat disimpulkan karena data belum tersedia. Lima IKU lainnya baru dapat dinilai berdasarkan capaian tahun 2025. Untuk memenuhi analisis tren secara berkelanjutan, DLHP perlu menjaga konsistensi definisi, formula, sumber data, jadwal pengumpulan, dan dokumentasi baseline setiap indikator mulai tahun 2025.